

MELACAK PERAN *GREEN NGO MOVEMENT* DALAM PENGENDALIAN KRISIS IKLIM DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Darmawan Purba¹, Bendi Juantara², R. Sigit Krisbintoro³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: darmawan.purba@fisip.unila.ac.id

ABSTRACT

This study examines the role of the Green NGO Movement in mitigating the climate crisis in Bandar Lampung City. The research focuses on two main aspects: mapping the direction of urban development through Regional Spatial Planning (RTRW) and Regional Medium-Term Development Planning (RPJMD) documents, and tracing the role of environmental NGOs in conducting advocacy, education, social control, and data production. This study employed a descriptive qualitative approach using observation, interviews, literature review, and documentation as data collection techniques. The informants involved in this study included BAPPEDA, BPBD, the Environmental Agency, and WALHI Lampung. The findings indicate that the development orientation of Bandar Lampung City has not fully reflected ecological principles. This is evident in the limited proportion of green open spaces, increasing land conversion pressures, recurring flooding, environmental pollution, and inadequate waste management. On the other hand, WALHI Lampung has emerged as an important actor in correcting the direction of development through community-based advocacy, environmental campaigns, ecosystem protection, and strengthening public awareness. However, these initiatives continue to face structural constraints, particularly limited resources, inadequate policy support, and the dominance of economic oriented development agendas. This study argues that the urban climate crisis can be addressed more effectively through collaborative environmental governance involving local government, NGOs, communities, academics, and the media.

Keyword: Green NGO movement, Environmental NGO, Climate crisis, Environmental governance.

ABSTRAK

Studi ini meneliti peran Gerakan LSM Hijau dalam mitigasi krisis iklim di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama: memetakan arah pembangunan perkotaan melalui dokumen Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Wilayah (RPJMD), dan menelusuri peran LSM lingkungan dalam melakukan advokasi, pendidikan, kontrol sosial, dan produksi data. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan observasi, wawancara, tinjauan pustaka, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Informan yang terlibat dalam studi ini meliputi BAPPEDA, BPBD, Badan Lingkungan Hidup, dan WALHI Lampung. Temuan menunjukkan bahwa orientasi pembangunan Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip ekologi. Hal ini terlihat dari terbatasnya proporsi ruang terbuka hijau, meningkatnya tekanan konversi lahan, banjir yang berulang, pencemaran lingkungan, dan pengelolaan sampah yang tidak memadai. Di sisi lain, WALHI Lampung telah muncul sebagai aktor penting dalam mengoreksi arah pembangunan melalui advokasi berbasis masyarakat, kampanye lingkungan, perlindungan ekosistem, dan penguatan kesadaran publik. Namun, inisiatif-inisiatif ini terus menghadapi kendala struktural, khususnya keterbatasan sumber daya, dukungan kebijakan yang tidak memadai, dan dominasi agenda pembangunan yang berorientasi ekonomi. Studi ini berpendapat bahwa krisis iklim perkotaan dapat diatasi secara lebih efektif melalui tata kelola lingkungan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, LSM, masyarakat, akademisi, dan media.

Kata kunci: Gerakan LSM Hijau, LSM Lingkungan, Krisis iklim, Tata kelola lingkungan.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

135

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX



PENDAHULUAN

Krisis iklim perkotaan semakin menjadi persoalan penting dalam tata kelola pembangunan daerah (Efendi, 2024). Kota tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, dan konsentrasi aktivitas sosial, tetapi juga sebagai ruang ekologis yang rentan terhadap tekanan pembangunan (Isra et al., 2025). Urbanisasi, ekspansi infrastruktur, pertumbuhan permukiman, peningkatan kawasan komersial, serta alih fungsi lahan telah memperbesar beban ekologis kota (Baihaqi et al., 2025). Akibatnya, berbagai persoalan seperti banjir, polusi, penurunan kualitas udara, kerusakan kawasan hijau, peningkatan volume sampah, dan menurunnya daya dukung lingkungan menjadi bagian dari wajah baru krisis iklim di kawasan perkotaan (Febriosa et al., 2025). Dalam konteks kota-kota berkembang, persoalan tersebut semakin kompleks karena orientasi pembangunan sering kali lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan ekologis (Mustofa et al., 2025). Pembangunan fisik dipandang sebagai indikator kemajuan, sementara ruang terbuka hijau, kawasan lindung, sistem drainase ekologis, pengelolaan sampah, dan perlindungan kawasan resapan belum selalu ditempatkan sebagai prioritas utama (Sinurat et al., 2025). Situasi ini menunjukkan bahwa krisis iklim tidak hanya lahir dari perubahan kondisi alam, tetapi juga dari pilihan kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kapasitas lingkungan (Humaida, 2024).

Kota Bandar Lampung merupakan salah satu contoh penting untuk membaca relasi antara pembangunan kota dan krisis iklim. Saat ini, Bandar Lampung menghadapi tekanan pembangunan yang sangat tinggi, hal ini dikarenakan Bandar Lampung menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, dan aktivitas ekonomi di Provinsi Lampung. Pertumbuhan kawasan terbangun mendorong peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman, kawasan komersial, infrastruktur jalan, dan fasilitas publik (Hikmah et al., 2025). Namun, perkembangan tersebut juga diikuti oleh berbagai persoalan ekologis, seperti alih fungsi lahan, rendahnya ruang terbuka hijau, kerusakan kawasan perbukitan, peningkatan volume sampah, serta meningkatnya risiko banjir perkotaan (Rachman et al., 2025).

Berbagai kajian sebelumnya telah membahas persoalan pembangunan perkotaan di Bandar Lampung, mulai dari dinamika penggunaan lahan, smart city, hutan kota, ketahanan kota terhadap perubahan iklim, ruang terbuka hijau, kawasan kumuh, hingga desain wisata kota. Namun, salah satu masalah krusial yang terus muncul adalah kecenderungan pembangunan kota yang lebih berorientasi pada ekonomi dan belum sepenuhnya berpihak pada aspek ekologis (Akibu, 2025; Aulia et al., 2025; Fandeli, 2021). Hal ini terlihat dari persoalan implementasi kebijakan tata ruang, baik dalam kerangka RTRW sebelumnya maupun RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2041. Semakin kritisnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan salah satu indikator utama dalam problem perkotaan. Sesuai dokumen RTRW Kota Bandar Lampung, Batasan minimal RTH yang disediakan minimal 30 persen dari luas wilayah kota (Fatmawati, 2020). Ketentuan minimal 30 persen RTH saat ini jauh dari harapan, saat ini ketersediaan RTH di Kota Bandar Lampung tersisa sekitar 3 sampai 4 persen. Kesenjangan ini menggambarkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan tata ruang dengan praktek dilapangan (Republika, 2020).

Rendahnya ketersediaan RTH bukan hanya persoalan administratif dalam pemenuhan target tata ruang. RTH memiliki fungsi ekologis sebagai area resapan air, pengendali suhu mikro, penyerap emisi, ruang sosial publik, dan penyangga kualitas lingkungan kota (Efendi, 2024). Ketika RTH terus mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan, kota kehilangan salah satu instrumen utama dalam menghadapi dampak perubahan iklim (Lamading & Nurlinah, 2025). Kondisi ini semakin serius karena alih fungsi lahan juga terjadi pada kawasan bukit, kawasan lindung, dan ruang ekologis lain yang semestinya menjadi penyangga lingkungan perkotaan. Pada bagian lain persoalan sampah menjadi salah satu yang turut serta menyumbang meningkatnya krisis iklim di Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa volume sampah yang masuk ke TPA Bakung mencapai lebih dari 800 ton per hari, sementara cakupan layanan persampahan belum menjangkau seluruh penduduk dan wilayah kota (Phelia & Damanhuri, 2019). Pengelolaan sampah yang masih berorientasi pada pembuangan akhir berpotensi meningkatkan resiko pencemaran lingkungan, menurunkan kualitas hidup masyarakat di sekitarnya, serta memperbesar beban ekologis perkotaan.

Problem tersebut menunjukkan bahwa krisis iklim di Kota Bandar Lampung tidak cukup dibaca sebagai persoalan teknis lingkungan. Ia juga merupakan persoalan tata kelola atau environmental governance. Lemahnya implementasi tata ruang, rendahnya efektivitas pengawasan lingkungan, dominasi orientasi pembangunan ekonomi, serta belum optimalnya kolaborasi lintas aktor memperlihatkan bahwa persoalan ekologis kota berkaitan erat dengan cara kebijakan pembangunan dirumuskan, dilaksanakan, dan dikoreksi (Praja & Asran, 2025). Dalam konteks tersebut, keterlibatan actor non-negara menjadi semakin relevan. NGO lingkungan berperan strategis dalam mendorong advokasi, memperkuat edukasi public, menjalankan fungsi control sosial, serta memberi tekanan kebijakan terhadap praktik pembangunan yang beresiko merusak lingkungan.

Dalam konteks Bandar Lampung, WALHI Lampung menjadi salah satu aktor penting dalam Green NGO Movement. Gerakan yang dilakukan mencakup advokasi berbasis masyarakat, perlindungan kawasan ekosistem esensial, kampanye anti-eksploitasi sumber daya alam, penguatan Wilayah Kelola Rakyat, serta kritik terhadap proyek pembangunan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan. Meskipun memiliki peran penting, NGO lingkungan sering menghadapi berbagai tantang structural, politik, dan sosial yang membatasi efektivitas gerakannya. Advokasi lingkungan menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi dukungan publik, literasi lingkungan masyarakat, pendanaan organisasi, efektivitas saluran advokasi, maupun rendahnya komitmen pemerintah terhadap isu lingkungan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan advokasi NGO mencakup minimnya literasi lingkungan, regulasi yang tidak berjalan, lemahnya kontribusi dalam persekutuan antarorganisasi, persoalan pendanaan, saluran advokasi yang tidak efektif, serta komitmen pemerintah yang rendah meskipun advokasi telah dilakukan (Angraeni et al., 2025).

Situasi tersebut mencerminkan adanya kontradiksi dalam tatakelola lingkungan di Bandar Lampung. Di satu sisi, krisis ekologis semakin nyata melalui penurunan RTH, alih fungsi lahan, kerusakan bukit, banjir, dan persoalan sampah. Di sisi lain, gerakan masyarakat sipil yang berupaya melakukan koreksi terhadap arah pembangunan belum sepenuhnya memiliki posisi kuat dalam proses kebijakan. Green NGO Movement sering hadir sebagai kelompok penekan, tetapi belum selalu terintegrasi sebagai mitra strategis dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan lingkungan daerah (Angraeni et al., 2025).

Advokasi lingkungan merupakan inti dari Green NGO Movement. Advokasi tidak hanya berarti menyuarakan kritik, tetapi juga membangun strategi untuk memengaruhi kebijakan, mengorganisasi dukungan, mengolah data, membangun jaringan, serta mengawasi implementasi kebijakan (Mukti & Efendi, 2020). Advokasi dipahami sebagai proses dinamis yang melibatkan berbagai actor, gagasan, agenda, dan kepentingan politik yang terus berkembang. Melalui proses tersebut, berbagai kelompok masyarakat berupaya memengaruhi pengambilan keputusan agar kebijakan public bergerak ke arah yang lebih responsive terhadap kebutuhan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Secara konseptual, advokasi lingkungan dapat dibaca melalui beberapa tahapan utama: membentuk lingkaran inti, memilih isu strategis, merancang sasaran dan strategi, mengolah data dan mengemas informasi, menggalang sekutu, memengaruhi pembuat kebijakan, serta memantau dan menilai program (Mukti & Efendi, 2020). Advokasi lingkungan membutuhkan tahapan ini karena perubahan kebijakan tidak cukup didorong oleh protes moral, tetapi juga oleh argumentasi, konsolidasi aktor, dan strategi intervensi yang tepat. Proses Advokasi membutuhkan basis data, organisasi gerakan, jaringan dukungan, strategi komunikasi, dan kanal pengaruh terhadap pembuat kebijakan.

Tabel 1: Dimensi Advokasi Green NGO Movement

Dimensi Advokasi	Makna Konseptual	Relevansi dalam Penelitian
Lingkaran inti	Aktor utama yang menggerakkan advokasi	Membaca kapasitas organisasi WALHI dan jejaringnya
Isu strategis	Masalah lingkungan yang dipilih sebagai fokus gerakan	RTH, alih fungsi lahan, kawasan lindung, sampah, dan eksploitasi SDA
Strategi advokasi	Cara memengaruhi kebijakan dan opini publik	Kampanye, lobi, kritik kebijakan, edukasi publik
Data dan informasi	Basis pengetahuan untuk memperkuat advokasi	Kajian RTH, pencemaran, kawasan ekologis, dan dampak pembangunan
Sekutu gerakan	Jaringan pendukung advokasi	Komunitas warga, NGO lain, akademisi, media
Pengaruh kebijakan	Upaya mendorong perubahan keputusan publik	Kritik RTRW, penolakan proyek, dorongan kebijakan pro-lingkungan
Evaluasi gerakan	Penilaian dampak advokasi	Mengukur efektivitas gerakan dan hambatan advokasi

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Dalam konteks WALHI Lampung, strategi advokasi telah tampak melalui pemilihan isu RTH, kawasan lindung, pencemaran pesisir, dan eksploitasi sumber daya alam. Laporan penelitian juga mencatat bahwa WALHI telah membangun jaringan dengan NGO lain, komunitas masyarakat, dan lembaga advokasi. Meski demikian, Gerakan ini perlu diperluas melalui kemitraan lintas sector, khususnya dengan akademisi dan sector swasta yang memiliki kepedulian terhadap isu keberlanjutan.

Collaborative governance menjadi konsep pendukung untuk menjelaskan bahwa pengendalian krisis iklim tidak dapat dilakukan oleh satu aktor saja (Mukti & Efendi, 2020). Pemerintah daerah berperan penting dalam mengarahkan pembangunan melalui kewenangan regulative dan pelaksanaan program yang dimiliki. NGO memiliki kapasitas advokasi dan kontrol sosial. Masyarakat menjadi pihak yang paling dekat dengan persoalan lingkungan karena merasakan langsung dampak dari perubahan, kerusakan, maupun pencemaran yang terjadi. Akademisi memiliki kapasitas produksi pengetahuan. Media memiliki peran memperluas isu ke ruang publik. Sektor swasta memiliki pengaruh terhadap praktik pembangunan dan investasi. Dalam konteks environmental governance, collaborative governance menjadi penting karena krisis iklim memiliki karakter lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas kepentingan (Mukti & Efendi, 2020).

Pengendalian krisis iklim membutuhkan koordinasi, mekanisme kolaboratif, dan komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan ekologis. Namun, kolaborasi tersebut belum selalu berjalan efektif. Seperti persoalan RTH, sampah, banjir, transportasi, dan alih fungsi lahan sebagai isu lintas sector yang tidak dapat diselesaikan secara parsial. Sejauh ini advokasi NGO menghadapi hambatan berupa minimnya literasi lingkungan, regulasi yang tidak berjalan, ego antarorganisasi, persoalan pendanaan, saluran advokasi yang tidak efektif, serta rendahnya komitmen pemerintah (Rahayu et al., 2023). Hambatan ini menunjukkan bahwa collaborative governance dalam isu lingkungan tidak hanya membutuhkan ruang dialog, tetapi juga membutuhkan kesetaraan posisi, transparansi data, komitmen politik, dan kapasitas kelembagaan.

Kajian tentang krisis iklim di Bandar Lampung selama ini cenderung menempatkan lingkungan sebagai persoalan teknis, seperti tata ruang, banjir, RTH, persampahan, dan mitigasi bencana. Pendekatan tersebut penting, tetapi belum cukup untuk menjelaskan mengapa persoalan ekologis terus berulang meskipun dokumen perencanaan dan regulasi lingkungan telah tersedia. Karena itu, artikel ini mengambil posisi berbeda dengan membaca krisis iklim sebagai persoalan environmental governance dan menempatkan Green NGO Movement sebagai aktor penting dalam proses koreksi kebijakan pembangunan perkotaan. Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menghubungkan tiga isu utama, yaitu krisis iklim perkotaan, kelemahan tata kelola lingkungan daerah, dan peran Green NGO Movement sebagai aktor non-

negara. Berdasarkan kerangka tersebut, artikel ini berupaya memahami tidak hanya bagaimana advokasi lingkungan dijalankan, tetapi juga sejauh mana Gerakan tersebut dapat memengaruhi arah pembangunan kota. Dengan kata lain, Green NGO tidak hanya dilihat sebagai kelompok kritik, tetapi sebagai aktor governance yang berperan dalam membangun tekanan kebijakan, memperluas kesadaran publik, dan mengawal pembangunan kota agar lebih berpihak pada keberlanjutan ekologis. Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana peran Green NGO Movement dalam pengendalian krisis iklim di Kota Bandar Lampung? Pertanyaan ini penting karena pengendalian krisis iklim tidak hanya memerlukan kebijakan teknis, tetapi juga membutuhkan tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, NGO, masyarakat, akademisi, media, dan sektor swasta.

Gambar 1: Relasi Konseptual Enviromental Governance



Sumber: Diolah Peneliti, 2026

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis peran Green NGO Movement dalam pengendalian krisis iklim di Kota Bandar Lampung. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan untuk menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan untuk memahami secara mendalam bagaimana organisasi lingkungan berperan dalam advokasi, kontrol sosial, edukasi publik, dan penguatan masyarakat dalam menghadapi problem ekologis perkotaan. Lokasi penelitian berada di Kota Bandar Lampung dengan fokus pada dinamika pembangunan kota, problem krisis iklim perkotaan, serta peran NGO lingkungan dalam merespons persoalan tersebut. Penelitian ini menelaah relasi antara praktik pembangunan daerah, meningkatnya tekanan ekologis kota, dan peran gerakan masyarakat sipil lingkungan.

Informan penelitian terdiri dari unsur pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil, yaitu BAPPEDA, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup, dan WALHI Lampung. Pemilihan informan dilakukan secara purposif berdasarkan keterlibatan dan relevansi kelembagaan masing-masing aktor dalam isu perencanaan pembangunan, pengelolaan lingkungan, kebencanaan, dan advokasi lingkungan.

Tabel 2: Teknik Pengumpulan Data

Teknik	Sumber Data	Fungsi Analisis
Observasi	Kondisi lingkungan perkotaan, RTH, TPA, kawasan terdampak	Membaca gejala krisis iklim secara langsung
Wawancara	BAPPEDA, BPBD, DLH, WALHI Lampung	Menggali perspektif pemerintah dan NGO
Studi pustaka	Buku, artikel jurnal, laporan penelitian	Memperkuat dasar teoritik
Dokumentasi	RTRW, RPJMD, foto lapangan, data lingkungan	Memvalidasi temuan lapangan

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung kondisi lingkungan perkotaan, khususnya terkait ruang terbuka hijau, Kawasan rawan banjir, pengelolaan sampah, serta tekanan pembangunan terhadap ruang-ruang ekologis. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dengan berpedoman pada isu utama penelitian agar informan dapat menjelaskan pengalaman, pandangan, dan penilaiannya secara lebih terbuka. Studi pustaka digunakan untuk memperkuat kerangka konseptual mengenai Green NGO Movement, environmental governance, advokasi lingkungan, dan krisis iklim perkotaan. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen RTRW Kota Bandar Lampung dan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2026, dan sumber lain yang relevan.

PEMBAHASAN

Krisis Iklim Perkotaan sebagai Dampak Pembangunan yang Belum Ekologis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis iklim di Kota Bandar Lampung tidak berdiri sebagai persoalan alamiah semata, tetapi berkaitan erat dengan arah pembangunan perkotaan yang belum sepenuhnya mempertimbangkan daya dukung ekologis. Dokumen perencanaan seperti RTRW Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2041 dan RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021–2026 telah memuat agenda pembangunan dan pengendalian lingkungan, tetapi implementasinya masih menghadapi ketegangan antara kebutuhan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Laporan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan daerah belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak ekologis secara optimal, sehingga krisis iklim perkotaan tampak melalui degradasi RTH, peningkatan banjir, dan pencemaran lingkungan. Temuan utama menunjukkan bahwa ketersediaan RTH Kota bandar lampung masih jauh dari target RTRW sebesar 30 persen. Realisasi RTH public yang baru berkisar di 3 sampai 4 persen menegaskan adanya kesenjangan anatar rencana tata ruang dan implementasi di lapangan. RTH yang rendah membuat kota kehilangan fungsi ekologis penting, terutama sebagai area resapan air, pengendali suhu, penyerap emisi, dan ruang sosial masyarakat (Priyanta & Zulkarnain, 2024).

Tabel 3: Temuan Problem Ekologis Kota Bandar Lampung

Problem Ekologis	Temuan Utama	Implikasi terhadap Krisis Iklim
Rendahnya RTH	RTH publik sekitar 3 sampai 4 %	Daya serap air menurun dan risiko banjir meningkat
Alih fungsi lahan	RTH dan kawasan hijau berubah menjadi kawasan terbangun	Fungsi ekologis kota melemah
Kerusakan bukit	Bukit tertekan oleh aktivitas permukiman dan pertambangan	Risiko longsor dan banjir meningkat
Persampahan	TPA Bakung menerima lebih dari 800 ton	Pencemaran tanah, air, dan udara

Transportasi	sampah per hari BRT tidak berjalan optimal	meningkat Ketergantungan kendaraan pribadi dan emisi meningkat
Lemahnya implementasi ruang	RTRW belum sepenuhnya tata mengendalikan pembangunan	Konflik antara pembangunan dan konservasi berulang

Gambar 2: Alur Krisis Iklim Kota Bandar Lampung



Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Selain RTH, persoalan sampah juga memperlihatkan lemahnya kapasitas ekologis kota. Lebih dari 800 ton sampah per hari masuk ke TPA Bakung, namun sistem pengelolaannya masih bertumpu pada pembuangan akhir. Kondisi tersebut menunjukkan ketidak seimbangan antara pertumbuhan perkotaan dan kapasitas pengelolaan lingkungan. Ketika sampah terus meningkat, tetapi kapasitas pengelolaan tidak bergerak seimbang, maka persoalan persampahan tidak hanya menjadi isu kebersihan kota, tetapi juga bagian dari krisis ekologis perkotaan. Krisis iklim di bandar lampung mencerminkan belum optimalnya tata Kelola pembangunan perkotaan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan program lingkungan, tetapi juga dengan koordinasi kebijakan dan pengendalian pembangunan yang masih lemah.

Krisis Iklim Perkotaan sebagai Dampak Pembangunan yang Belum Ekologis

Dalam situasi melemahnya daya dukung lingkungan, Green NGO Movement hadir sebagai aktor korektif. WALHI Lampung menjadi salah satu organisasi lingkungan yang aktif dalam advokasi, kampanye, penguatan masyarakat, dan kontrol sosial terhadap arah pembangunan kota. WALHI Lampung terbentuk pada tahun 1996 melalui inisiatif berbagai elemen masyarakat sipil, NGO, dan organisasi

pencinta alam yang memiliki perhatian terhadap isu lingkungan. Jejaringnya mencakup lembaga anggota seperti LBH Bandar Lampung, Mitra Bentala, Kawan Tani, dan Solidaritas Perempuan. Aktivitas WALHI meliputi advokasi, kampanye, dan penguatan masyarakat lokal dalam memperjuangkan tata Kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks krisis iklim perkotaan, peran WALHI menjadi penting karena penyelesaian masalah lingkungan tidak cukup bertumpu pada kebijakan pemerintah semata. Pemerintah memiliki kewenangan regulatif, tetapi NGO memiliki kapasitas untuk mengisi ruang kritik, memperluas isu ke ruang publik, mengorganisasi dukungan masyarakat, dan memberi tekanan terhadap kebijakan pembangunan yang tidak berpihak pada lingkungan.

Dalam kerangka environmental governance, WALHI tidak hanya berperan sebagai kelompok penekan, tetapi sebagai aktor yang membantu membangun akuntabilitas ekologis sebagai berikut:

Tabel 4: Bentuk Peran Green NGO Movement di Kota Bandar Lampung

Bentuk Peran	Praktik yang Dilakukan	Makna Governance
Advokasi kebijakan	Kritik terhadap alih fungsi lahan, RTRW, dan proyek yang merusak lingkungan	Mengoreksi arah kebijakan pembangunan
Kampanye publik	Aksi lingkungan, seminar, opini media, dan kampanye krisis iklim	Memperluas kesadaran publik
Penguatan masyarakat	Penguatan Wilayah Kelola Rakyat	Mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan lingkungan
Kontrol sosial	Mengawasi pembangunan yang berdampak ekologis	Menekan penyimpangan tata ruang
Produksi pengetahuan	Kajian lingkungan, data RTH, isu sampah, dan pencemaran	Menyediakan dasar advokasi berbasis data
Jejaring advokasi	Kolaborasi dengan NGO, komunitas, mahasiswa, dan pegiat lingkungan	Memperluas basis gerakan sipil

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Salah satu bentuk gerakan yang menonjol adalah advokasi berbasis isu strategis. WALHI Lampung mengangkat isu RTH, kawasan lindung, pencemaran pesisir, sampah perkotaan, dan eksploitasi sumber daya alam sebagai bagian dari agenda lingkungan. Misalnya, WALHI pernah melakukan kampanye lingkungan yang menghubungkan isu krisis iklim global dengan persoalan lokal di Bandar Lampung, termasuk tuntutan penyelesaian masalah sampah dan perkotaan. Selain kampanye, WALHI juga menggunakan forum diskusi publik sebagai ruang advokasi. Salah satu contohnya adalah diskusi publik dan peluncuran kajian tentang pengelolaan sampah dan urgensi pembangunan PLTSA di Bandar Lampung. Kegiatan ini mempertemukan beragam pemangku kepentingan, termasuk WALHI, organisasi masyarakat sipil, pegiat lingkungan, akademisi, mahasiswa, serta unsur pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung. Pola ini menunjukkan bahwa strategi WALHI tidak hanya bertumpu pada aksi protes, tetapi juga pada produksi wacana, penguatan pengetahuan publik, dan pembentukan ruang dialog. Dalam artikel ini, posisi tersebut dapat dibaca sebagai bentuk “advocacy-based environmental governance”, yaitu ketika gerakan NGO berusaha mengoreksi kebijakan lingkungan melalui kombinasi data, kampanye, jejaring, dan tekanan publik.

Krisis Iklim Perkotaan sebagai Dampak Pembangunan yang Belum Ekologis

Strategi WALHI Lampung dalam pengendalian krisis iklim dapat dibaca melalui beberapa tahapan advokasi. Pertama, membangun lingkaran inti gerakan. WALHI tidak bergerak sebagai aktor tunggal, melainkan terhubung dengan berbagai elemen masyarakat sipil, mulai dari NGO, komunitas warga, organisasi advokasi, hingga kelompok lingkungan. Keterhubungan ini memperkuat daya tekan Gerakan, karena advokasi lingkungan hanya efektif Ketika dibangun melalui Kerjasama dan dukungan lintas aktor. Kedua, memilih isu strategis. WALHI memfokuskan perhatian pada isu RTH, Kawasan lindung, pencemaran, pengelolaan sampah, dan eksploitasi sumber daya alam karena persoalan-persoalan tersebut

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan ekologi Kota Bandar Lampung. Ketiga, mengolah data dan mengemas informasi. Laporan penelitian menyebut bahwa WALHI telah menggunakan data lingkungan dalam isu RTH dan pencemaran laut di pesisir Panjang, meskipun masih perlu diperkuat melalui riset yang lebih komprehensif dan visualisasi yang mudah dipahami publik serta pembuat kebijakan. Keempat, mengonsolidasikan aliansi strategis. WALHI membangun kerja sama dengan masyarakat local, organisasi non-pemerintah, dan komunitas warga sebagai basis dukungan kolektif dalam memperkuat Gerakan advokasi lingkungan. Namun, penguatan jejaring dengan akademisi, sektor swasta yang peduli keberlanjutan, dan tokoh publik masih menjadi ruang pengembangan. Kelima, memengaruhi pembuat kebijakan. WALHI terlibat secara aktif dalam kegiatan advokasi kebijakan dengan pemerintah daerah guna mendorong penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam proses pembangunan. Keenam, memantau dan menilai program. Pemantauan telah dilaksanakan, namun penelitian ini merekomendasikan penguatan evaluasi melalui kerangka logical framework agar proses penilaian program menjadi lebih terarah dan sistematis.

Tabel 5: Strategi Advokasi WALHI Lampung

Tahap Advokasi	Praktik WALHI Lampung	Catatan Penguatan
Lingkaran inti	Jaringan NGO, komunitas, dan lembaga advokasi	Perlu diperluas ke akademisi dan sektor swasta
Isu strategis	RTH, kawasan lindung, sampah, pencemaran pesisir	Perlu dikemas sebagai agenda iklim perkotaan
Data dan informasi	Kajian RTH dan pencemaran lingkungan	Perlu visualisasi data dan policy brief
Sekutu gerakan	Masyarakat lokal, NGO, mahasiswa, pegiat lingkungan	Perlu tokoh publik dan media strategis
Pengaruh kebijakan	Kritik, lobi, dan advokasi kebijakan	Perlu kanal partisipasi formal
Evaluasi gerakan	Pemantauan dampak program	Perlu evaluasi terukur dan rutin

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Hambatan Green NGO Movement dalam Enviromental Governance

Meskipun memiliki peran penting, efektivitas Green NGO Movement masih menghadapi hambatan serius. Hambatan pertama muncul dari kuatnya orientasi pembangunan ekonomi. WALHI kerap berhadapan dengan proyek infrastruktur, Kawasan pemukiman, dan aktifitas industry yang lebih menekankan pertumbuhan ekonomi dibanding perlindungan ekologis. Tekanan ini membuat advokasi lingkungan berada dalam posisi yang tidak mudah karena harus berhadapan dengan kepentingan pemerintah, swasta, dan pemilik lahan. Hambatan kedua berkaitan dengan minimnya dukungan pemerintah terhadap agenda lingkungan. Hal ini terlihat dari sejumlah kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip keberlanjutan sebagaimana diperjuangkan oleh WALHI. Laporan penelitian menyebut contoh berupa izin proyek pembangunan tanpa kajian AMDAL yang komprehensif, pengabaian kawasan lindung, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang dan lingkungan. Hambatan ketiga berkaitan dengan keterbatasan sumber daya organisasi. Sebagai Lembaga non-profit, WALHI menghadapi keterbatasan dukungan finansial dan kapasitas tenaga kerja dalam menjalankan agenda advokasi lingkungan. Program lingkungan membutuhkan dukungan dana dan kapasitas organisasi yang besar, terutama untuk menjangkau wilayah yang luas dan mengawal isu mitigasi serta adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Hambatan keempat adalah tantangan sosial dan budaya. Sebagian masyarakat masih menempatkan manfaat ekonomi jangka pendek sebagai prioritas utama, sehingga isu perlindungan lingkungan belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam aktivitas pembangunan. Kondisi ini membuat advokasi lingkungan tidak hanya berhadapan dengan kebijakan pemerintah, tetapi juga dengan cara pandang masyarakat terhadap pembangunan, pekerjaan, dan manfaat ekonomi sesaat.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

Tabel 6: Hambatan Green NGO Movement

No	Hambatan	Bentuk Masalah	Implikasi terhadap Advokasi
1	Tekanan pembangunan ekonomi	Infrastruktur, perumahan, industri, dan investasi	Advokasi berhadapan dengan kepentingan ekonomi kuat
2	Kebijakan belum pro-lingkungan	AMDAL lemah, kawasan lindung diabaikan, sanksi tidak tegas	Regulasi tidak menjadi instrumen koreksi efektif
3	Keterbatasan sumber daya	Dana, SDM, riset, dan jangkauan advokasi terbatas	Dampak gerakan belum maksimal
4	Literasi lingkungan rendah	Publik belum melihat krisis iklim sebagai isu mendesak	Dukungan sosial terhadap advokasi belum luas
5	Kolaborasi belum optimal	Relasi pemerintah-NGO belum setara	NGO lebih sering menjadi pressure group daripada mitra kebijakan

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Hambatan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama Green NGO Movement bukan hanya kapasitas internal organisasi, tetapi juga struktur governance yang belum memberi ruang memadai bagi partisipasi masyarakat sipil. Dengan kata lain, WALHI dapat memiliki data, jejaring, dan kapasitas advokasi, tetapi pengaruhnya tetap terbatas jika pemerintah daerah tidak membuka kanal partisipasi yang substantif dalam proses kebijakan lingkungan.

Gambar 3: Peran Green NGO Movement
Dari Prepressure Group Menjadi Aktor Governance

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Green NGO Movement di Kota Bandar Lampung bergerak pada dua arena sekaligus. Arena pertama adalah arena sosial, yaitu membangun kesadaran publik, mengorganisasi masyarakat, mengampanyekan isu lingkungan, dan memperkuat kepedulian terhadap

krisis iklim. Arena kedua adalah arena kebijakan, yaitu mengkritik RTRW, menolak proyek yang dianggap merusak lingkungan, mengawal isu RTH, serta mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada keberlanjutan. Dengan demikian, WALHI Lampung tidak semata-mata hadir sebagai aktor kritik dalam isu-isu lingkungan. Dalam konteks environmental governance, WALHI berperan sebagai aktor korektif yang berupaya menghubungkan masalah ekologis dengan ruang kebijakan publik. Perannya tidak selalu menghasilkan perubahan kebijakan secara langsung, tetapi berkontribusi dalam memperluas kesadaran publik, menjaga isu lingkungan tetap berada dalam ruang perdebatan, dan memberi tekanan terhadap pembangunan yang mengabaikan keberlanjutan.

Namun, efektifitas peran tersebut sangat ditentukan oleh kualitas tata Kelola kolaboratif yang terbangun antara WALHI, pemerintah daerah, masyarakat, dan aktor-aktor lainnya. Selama relasi pemerintah, NGO, masyarakat, akademisi, media, dan sektor swasta belum dibangun secara setara, maka gerakan lingkungan akan terus berada pada posisi reaktif. Untuk itu, pengendalian krisis iklim di Kota Bandar Lampung membutuhkan pergeseran dari model advokasi yang bersifat sporadis menuju tata kelola lingkungan yang lebih kolaboratif, berbasis data, dan memiliki kanal partisipasi formal dalam proses perencanaan pembangunan. Temuan utama artikel ini menunjukkan bahwa krisis iklim di Kota Bandar Lampung bukan hanya persoalan ekologis, tetapi juga kelembagaan. Green NGO Movement telah menjalankan fungsi korektif, tetapi belum sepenuhnya terinstitusionalisasi dalam tata kelola lingkungan daerah. Inilah ruang pembaruan governance yang perlu diperkuat agar advokasi lingkungan tidak berhenti sebagai kritik, tetapi dapat masuk ke dalam proses formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pembangunan kota.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa krisis iklim di Kota Bandar Lampung tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis lingkungan, tetapi sebagai persoalan tata kelola pembangunan perkotaan. Degradasi ruang terbuka hijau, meningkatnya risiko banjir, pencemaran lingkungan, tekanan alih fungsi lahan, dan persoalan persampahan memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologis. Dokumen perencanaan seperti RTRW 2021–2041 dan RPJMD 2021–2026 telah memuat arah pembangunan dan pengendalian lingkungan, tetapi implementasinya belum sepenuhnya mampu menjaga daya dukung ekologis kota. Dalam konteks tersebut, Green NGO Movement, khususnya WALHI Lampung, memiliki peran penting sebagai aktor korektif dalam environmental governance. Peran tersebut terlihat melalui advokasi kebijakan, kampanye lingkungan, penguatan masyarakat, perlindungan kawasan ekosistem esensial, penguatan Wilayah Kelola Rakyat, serta kritik terhadap proyek pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan. Dengan demikian, WALHI tidak hanya berperan sebagai kelompok penekan, tetapi juga sebagai aktor masyarakat sipil yang berupaya membangun kesadaran publik, memperluas jejaring advokasi, dan menjaga isu lingkungan tetap berada dalam ruang kebijakan publik.

Namun, efektivitas Green NGO Movement dalam pengendalian krisis iklim masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut meliputi ketidakselarasan antara kebijakan pemerintah dan prinsip keberlanjutan, keterbatasan sumber daya organisasi, rendahnya literasi lingkungan masyarakat, resistensi sosial terhadap agenda pelestarian lingkungan, serta belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah, NGO, masyarakat, akademisi, media, dan sektor swasta. Kondisi ini menunjukkan bahwa gerakan lingkungan belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan kota. Temuan utama artikel ini menegaskan bahwa pengendalian krisis iklim perkotaan membutuhkan pergeseran dari model advokasi yang reaktif menuju environmental governance yang kolaboratif, berbasis data, dan terintegrasi ke dalam proses kebijakan. Green NGO Movement memiliki kapasitas untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan negara, tetapi peran tersebut hanya dapat bekerja secara optimal apabila tersedia ruang partisipasi yang setara, kanal komunikasi kebijakan yang terbuka, dan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan keberlanjutan ekologis sebagai dasar pembangunan kota.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

REFERENSI

- Akibu, R. S. (2025). Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo Integrasi Sosial, Ekonomi, Dan Lingkungan. *Perubahan Iklim Dan Pembangunan Berkelanjutan*, 107.
- Angraeni, M., Azizah, W., & Nurhadi, A. M. (2025). Peran, Strategi, dan Tantangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan dalam Menyelesaikan Permasalahan Pengelolaan Sampah. *Advances In Education Journal*, 2(3), 2223–2233.
- Aulia, M. R., Atikah, Q., Hartini, H., Sani, S. R., & Maulidia, V. (2025). *Ekonomi Hijau Sebagai Tantangan Pembangunan Berkelanjutan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Baihaqi, M. G., Kusuma, R. S. B. G., Ozora, F. A., & Ajesbiah, T. R. (2025). Transformasi penataan ruang daerah: Tantangan dan peluang menuju pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Regional Planning*, 7(2), 82–91.
- Efendi, Z. (2024). Strategi pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan daerah untuk menghadapi perubahan iklim global. *Indonesian Journal of Research and Service Studies*, 1(4), 198–209.
- Fandeli, C. (2021). *Pembangunan kota hijau*. Ugm Press.
- Fatmawati. (2020). Potensi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Publik Di Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*.
- Febriosa, S., Pratama, W. S., Mahdalena, Z., & Ikhwan, I. (2025). Analisis Dampak Perubahan Iklim Terhadap Kualitas Lingkungan Hidup Dan Kehidupan Sosial Masyarakat. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 5(2), 2211–2221.
- Hikmah, H. D., Mansyur, U., & Syahbandar, M. Y. (2025). Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Sekitar Jalan Lingkar Dramaga Kabupaten Bogor. *Jendela Kota: Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah Dan Kota*, 2(1), 17–32.
- Humaida, N. (2024). Dasar-dasar pengetahuan lingkungan berbasis perubahan iklim global. *UrbanGreen Central Media*.
- Isra, M., Sakti, H. H., Radhinal, Y., & Ahmad, D. N. A. (2025). Rekonstruksi Ruang Peri-Urban: Interaksi Sosial-Ekonomi Dalam Dinamika Kutub Pertumbuhan Dan Proses Gentrifikasi Di Kawasan Perkotaan Bulukumba. *Jurnal Peweka Tadulako*, 4(1), 1–17.
- Lamading, E. Z., & Nurlinah, S. (2025). Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Dalam Penataan Ruang Terbuka Hijau: Studi Kasus Kabupaten Enrekang.
- Mukti, R. A., & Efendi, D. (2020). Kampung Hijau Gambiran: Praktik tata kelola lingkungan hidup berbasis collaborative governance. *Samudra Biru*.
- Mustofa, M. U., Rafifah, A. M., Zalzabila, A., Sari, M., Rosianawati, A., Firmansyah, M. A., Pratama, H. Y., & Nigitama, R. (2025). PROBLEMATISASI PARADIGMA SUSTAINABLE DEVELOPMENT DAN KEADILAN EKOLOGIS BAGI NEGARA BERKEMBANG. *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(2).
- Phelia, A., & Damanhuri, E. (2019). Kajian evaluasi tpa dan analisis biaya manfaat sistem pengelolaan sampah di tpa (studi kasus tpa bakung kota bandar lampung). *Jurnal Teknik Lingkungan*, 25(2), 85–100.
- Praja, S. E., & Asran, A. (2025). Strategi Tata Ruang Kota Ramah Lingkungan: Pendekatan Ekologis dalam Perencanaan Urban Kota Makassar. *Journal of Health Quality Development*, 5(1), 12–22.
- Priyanta, M., & Zulkarnain, C. S. A. (2024). Urban green open space in developing countries: Indonesia regulations, problems and alternative solutions. *Journal of Property, Planning and Environmental Law*, 16(2), 134–151.
- Rachman, R. M., Mas'ud, F., Sasmita, A., Balany, F., Sjachrawy, L. O. M. I., Aswad, N. H., & Sukri, A. S. (2025). *Sistem Pengelolaan Lingkungan Terpadu di Wilayah Perkotaan*. Arsy Media.
- Rahayu, S., Laraswati, D., Permadi, D. B., Sahide, M. A. K., & Maryudi, A. (2023). Only a noise? The role of non-governmental organizations in the policy processes of a new social forestry model in indonesia. *Small-Scale Forestry*, 22(2), 253–270.

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 9 September 2026

Republika. (2020). Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandar Lampung Merosot | Republika Online.
<https://news.republika.co.id/berita/s75cfu436/ruang-terbuka-hijau-di-kota-bandar-lampung-merosot>

Sinurat, A., Sihombing, B. H., Saragih, R., Setiawan, A. R., & Pasaribu, V. (2025). Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bah Bolon Untuk Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berkelanjutan. *Jurnal Regional Planning*, 7(2), 98–108.